

STUDI KOMPARASI MUATAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM 2006 DAN 2013 UNTUK TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Oleh: Verbena Ayuningsih Purbasari dan Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd/Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
verbena.ayu29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mendeskripsikan muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Kedua*, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen Kurikulum 2006 yang diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan dokumen Kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Teknik keabsahan data menggunakan *cross check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 tidak ditulis secara eksplisit dan dikelompokkan seperti Kurikulum 2013. Jika dicermati dari penggunaan kata kerja operasional (KKO), Kurikulum 2006 mengandung 66,67% komponen pengetahuan kewarganegaraan, 28,89% komponen sikap/karakter kewarganegaraan dan 4,44% komponen keterampilan kewarganegaraan. Sedangkan pada Kurikulum 2013 mengandung 31,75% komponen pengetahuan kewarganegaraan, 28,57% komponen sikap/karakter kewarganegaraan, dan 39,68% komponen keterampilan kewarganegaraan. *Kedua*, persamaan muatan kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 dan 2013 adalah jumlah persentase komponen sikap/karakter kewarganegaraan yang hampir sama, yakni 28,89% dan 28,57%. Perbedaannya adalah, muatan kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 lebih didominasi oleh komponen pengetahuan kewarganegaraan dengan jumlah persentase 66,67%, sedangkan pada Kurikulum 2013 didominasi oleh komponen keterampilan kewarganegaraan dengan jumlah persentase 39,68%.
Kata kunci: Muatan, Kompetensi Kewarganegaraan, Kurikulum 2006 dan 2013, SMP.

COMPARISON STUDY OF CITIZENSHIP COMPETENCIES IN CURRICULUM 2006 DAN 2013 FOR THE LEVEL OF JUNIOR HIGH SCHOOL (SMP)

By: Verbena Ayuningsih Purbasari dan Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd/Civics and Law, Faculty of Social Sciences, State University of Yogyakarta
verbena.ayu29@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to: first, describe the citizenship competencies in Curriculum 2006 and 2013 for the level of Junior High School (SMP). Second, describe the similarities and differences citizenship competencies in Curriculum 2006 and 2013.

This research is a content analysis study (content analysis) and the approach used is qualitative. The research object were Curriculum 2006 document set out in Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah and Curriculum 2013 document set out in Permendikbud Nomor 58 Tahun tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs. The data were collected through documentation and interviews. The data were analyzed through content analysis. The data trustworthiness was enhanced by the data cross check.

The research findings show that: first, citizenship competencies in Curriculum 2006 unwritten explicitly and unclassified as those in Curriculum 2013. Observed by examining operational verb (KKO), Curriculum 2006 contains 66.67% civic knowledge, 28.89% civic disposition, and 4.44%, civic skills. Whereas 2013 contains 31.75% civic knowledge, 28.57% civic disposition, and 39.68% civic skill. Second, the similarity between citizenship competencies in Curriculum 2006 and those in 2013 was a percentage of civic disposition almost same, 28.89% and 28.57%. The difference, Curriculum 2006 was dominated by 66.67% of civic knowledge, while Curriculum 2013 was dominated by 39.68% of civic skills.

Keywords: *Contents, Competencies Citizenship, Curriculum 2006 and 2013, SMP.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berlangsung selama 9 tahun. Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa materi-materi yang wajib diajarkan pada tingkat SMP/MTs sebagai tingkat pendidikan dasar antara lain: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Pada bagian penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang dimaksudkan untuk membentuk peserta

didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam mengajar PKn, guru harus mempunyai pemahaman mendalam bahwa PKn mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan. Muatan kompetensi kewarganegaraan yang dimaksud meliputi komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), komponen sikap/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), dan komponen keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Selain memahami muatan kompetensi kewarganegaraan dalam PKn, guru juga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan dan perkembangan. Kurikulum harus dinamis dan selalu berubah agar dapat mengikuti dan memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses itu, guru dituntut untuk selalu mengembangkan keterampilan mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun seiring dengan proses perubahan kurikulum, guru sering mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian terhadap tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara mengajar.

Pada masa berlakunya Kurikulum 2006, secara kurikuler PKn mempunyai hambatan antara lain pelaksanaan pembelajaran PKn yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif

dan kurang diimbangi oleh pengembangan komponen kewarganegaraan yang lain (Sunarso, dkk., 2008: 4-10). Berbeda halnya dengan pembelajaran pada Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi lebih bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dari berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). Sebagai contoh, menurut E. Mulyasa (2015: 65) pada proses pembelajaran dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu. Akan tetapi yang terjadi di lapangan kadang tidaklah selalu demikian.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, ditemukan permasalahan. Sekolah tersebut pernah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester mulai tahun ajaran 2013/2014 akan tetapi pada pertengahan tahun ajaran 2014/2015 sekolah kembali menerapkan Kurikulum 2006. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP sudah memahami bahwa mata pelajaran PKn mengandung tiga komponen, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Namun, guru PKn SMP berpendapat bahwa Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2006 belum memetakan secara eksplisit muatan kompetensi kewarganegaraan seperti yang

terdapat dalam Kurikulum 2013. Komponen pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat secara jelas melalui Kompetensi-Kompetensi Dasar yang terpetakan dalam KI-1 sampai KI-4. Guru PKn juga berpendapat bahwa bahwa penilaian dalam Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik, yakni penilaian yang dilakukan secara menyeluruh yang dimulai dari *input*, proses, maupun *output*. Hal tersebut dinilai sangat memberatkan guru karena adanya kesulitan untuk menghafal siswa satu-persatu dalam melakukan penilaian secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis analisis isi (*content analysis*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hamid Darmadi (2011: 160) analisis isi adalah deskripsi yang sistematis dari komponen objek penelitian. Oleh karena itu, hasil dari analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti (Eriyanto, 2011: 15-16). Salah satu ciri dari analisis isi adalah tidak adanya subjek penelitian, melainkan objek penelitian (Burhan Bungin, 2012: 192).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Imam Gunawan (2013: 85), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah yang ingin diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan muatan kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 tingkat SMP/MTs.

Objek dalam penelitian ini adalah dokumen Kurikulum 2006 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dokumen Kurikulum 2013 yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari-Juni 2016. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dokumentasi dan wawancara. Guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik *cross check* (Burhan Bungin, 2003: 95-96). Untuk menganalisis data hasil penelitian, menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2015: 289) dalam penelitian

kualitatif tidak menunggu sampai semua data terkumpul, melainkan dilakukan secara bertahap dan berangsur setelah mendapatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Muatan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk Tingkat Satuan Pendidikan SMP

Dicermati dari penggunaan KKO (kata kerja operasional), hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2006 mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan dengan jumlah persentase sebagai berikut: 66,67% mengandung komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), 4,44% mengandung komponen keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan mengandung 28,89% komponen sikap/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Komponen-komponen kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 tidak ditulis secara eksplisit dan dikelompokkan apakah mengandung muatan komponen pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter

kewarganegaraan, atau keterampilan kewarganegaraan.

Narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 dikembangkan secara urut dan konsisten, mulai dari pengembangan komponen pengetahuan kewarganegaraan lalu diikuti oleh pengembangan sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Akan tetapi, kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 tidak secara eksplisit dipetakan menjadi Kompetensi Inti-Kompetensi Inti seperti pada Kurikulum 2013. Untuk mengidentifikasi muatan komponen yang terkandung dalam setiap Kompetensi Dasar perlu mencermati penggunaan jenis KKO (kata kerja operasional) agar jelas kandungan komponen pengetahuan kewarganegaraan (kognitif), sikap/karakter kewarganegaraan (afektif) dan keterampilan kewarganegaraan (psikomotorik).

Selain itu, menurut hasil analisis tidak semua Kompetensi Dasar pada setiap tingkatan kelas mengandung ketiga komponen kewarganegaraan yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewarganegaraan

maupun keterampilan kewarganegaraan. Sebagai contoh, bahwa komponen keterampilan kewarganegaraan hanya terdapat dalam KD 1.3 kelas VII dan KD 3.4 kelas IX. Didukung oleh keterangan yang diperoleh dari narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa hal tersebut merupakan kelemahan dari Kurikulum 2006 karena kompetensi kewarganegaraan tidak ditulis secara eksplisit bahkan komponen pengetahuan kewarganegaraan cenderung mendominasi jika dibandingkan dengan komponen lain.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru sebagai bentuk penyempurnaan dari Kurikulum 2006. Salah satu hal yang menjadi dasar dilakukannya penyempurnaan terhadap Kurikulum 2006 adalah kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan pribadi peserta didik (pengetahuan, keterampilan dan sikap) (E.Mulyasa, 2015: 61).

Menurut narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi-kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 sudah ditulis secara eksplisit dan dikelompokkan dalam KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Oleh karena itu, tidaklah

sulit dalam mengidentifikasi komponen-komponen kewarganegaraan pada Kurikulum 2013. Dicermati dari penggunaan KKO, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 mengandung komponen-komponen kewarganegaraan dengan jumlah persentase sebagai berikut: komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) 31,75%, komponen keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) 39,68%, dan komponen sikap/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) 28,57%.

Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 seharusnya disusun secara konsisten dan urut, dari KI-3 (ranah pengetahuan) dan KI-4 (ranah keterampilan) lalu diikuti oleh KI-1 (ranah spiritual) dan KI-2 (ranah sosial). Walaupun begitu, kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 didukung oleh adanya model-model pembelajaran yang memungkinkan untuk membangun sikap kritis, partisipatif dan berkaitan langsung dengan pengalaman hidup, seperti *Discovery* dan *Project Based Learning* yang dapat membangun

kompetensi kewarganegaraan agar dimiliki oleh peserta didik.

B. Persamaan dan Perbedaan Muatan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk Tingkat Satuan Pendidikan SMP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Kurikulum 2006 maupun 2013 masing-masing secara utuh mengandung kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari komponen pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki kawasan pembelajaran yang khas. Hal tersebut dikarenakan dalam PKn terdapat kandungan komponen pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan (Cholisin, 2011: 4). Setelah dicermati dari penggunaan KKO (kata kerja operasional), persamaan lain yang dapat ditemukan adalah komponen sikap/keterampilan pada kedua kurikulum tersebut mempunyai persentase yang hampir sama, yakni 29,5% pada Kurikulum 2006 dan 28,57% pada Kurikulum 2013. Komponen sikap/karakter kewarganegaraan merupakan

komponen yang paling pokok dalam mata pelajaran PKn, sebab komponen ini merupakan muara dari komponen-komponen sebelumnya (Branson, 1999: 23).

Sesuai dengan penjelasan dari narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa komponen sikap/karakter kewarganegaraan merupakan aspek pengiring dan dikembangkan dari komponen pengetahuan kewarganegaraan (kognitif). Muatan materi yang terkandung dalam Kurikulum 2006 dan 2013 pada umumnya hampir sama. Oleh karena itu, kandungan komponen sikap/karakter kewarganegaraan pada kedua kurikulum juga hampir sama. Walaupun untuk mengidentifikasi komponen sikap/karakter kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 harus mencermati penggunaan KKO (kata kerja operasional) karena tidak secara eksplisit dipetakan dalam KI seperti pada Kurikulum 2013, komponen sikap/karakter kewarganegaraan pada kedua kurikulum tersebut sama-sama merupakan bagian yang penting dan menjadi muara dalam pembelajaran PKn.

Selain persamaan, hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan. *Pertama*, jika dicermati

dari penggunaan KKO (kata kerja operasional), komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 mempunyai persentase 66,67% dan persentase komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 sebesar 31,75%. Jumlah persentase komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 dominan jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013 dikarenakan KKO (kata kerja operasional) yang digunakan dalam Kompetensi Dasar Kurikulum 2006 yang lebih banyak menggunakan KKO ranah kognitif.

Dalam pembelajaran, pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan pengembangan pola pikir peserta didik terhadap materi yang harus dikuasai. Pada Kurikulum 2006, pengetahuan kewarganegaraan menjadi dasar bagi pengembangan komponen lain, seperti komponen sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan.

Narasumber bidang Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan, bahwa Kurikulum 2006 lebih didominasi oleh komponen pengetahuan kewarganegaraan. Penyebab komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 lebih mendominasi dikarenakan adanya pengaruh dari tradisi

pendidikan di Indonesia yang selalu mengutamakan aspek kognitif/intelektualitas. Selain itu, juga dikarenakan pada saat berlakunya Kurikulum 2006 terjadi perubahan penting dari nilai-nilai dalam P4 yang dikembalikan kepada posisi akar keilmuan (*body of knowledge*) dari PKn, sehingga menyebabkan banyaknya materi yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Narasumber juga menambahkan, bahwa komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 tidak ditulis secara eksplisit seperti Kurikulum 2013 yang mengelompokkan komponen pengetahuan kewarganegaraan dalam KI-3 (ranah kognitif). Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi komponen kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 sebaiknya dengan memperhatikan dan mencermati KKO (kata kerja operasional) yang digunakan dalam Kompetensi Dasar.

Kedua, berdasarkan hasil deskripsi terhadap terhadap muatan kompetensi kewarganegaraan dalam setiap Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn pada Kurikulum 2006 dan PPKn pada Kurikulum 2013 ditemukan bahwa komponen keterampilan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 hanya mempunyai

persentase 4,44%. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan komponen keterampilan kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 dengan persentase 39,68%. Sama dengan komponen pengetahuan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006, komponen keterampilan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 juga tidak ditulis secara eksplisit dan dikelompokkan seperti pada Kurikulum 2013.

Komponen keterampilan kewarganegaraan merupakan komponen dimana peserta didik diharapkan mampu menggunakan kemampuan psikomotoriknya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran PKn. Dari perbandingan jumlah persentase komponen keterampilan kewarganegaraan diketahui bahwa komponen keterampilan kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 lebih dominan jika dibandingkan dengan Kurikulum 2006. Didukung dengan keterangan yang diperoleh dari narasumber, bahwa dominannya komponen keterampilan pada Kurikulum 2013 karena hal tersebut sudah merupakan pilihan dari para pengembang kebijakan terkait dengan kurikulum mata pelajaran PKn. Artinya, kebijakan tersebut bertujuan

agar kandungan komponen keterampilan kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 lebih baik, jelas, dapat mengikuti perkembangan jaman, serta agar lebih mengacu pada komponen-komponen taksonomi pembelajaran yang ideal dan disepakati secara universal. Taksonomi pembelajaran yang dimaksud antara lain terdiri dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk tingkat satuan pendidikan SMP.

Untuk tingkat SMP, muatan kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 tidak ditulis secara eksplisit dan dikelompokkan seperti pada Kurikulum 2013, yang dikelompokkan ke dalam KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Jika dicermati dari penggunaan KKO (kata kerja operasional), diketahui bahwa jumlah persentase muatan kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 adalah sebagai berikut: 66,67% komponen pengetahuan kewarganegaraan, 4,44%

komponen keterampilan kewarganegaraan, dan 28,89% komponen sikap/karakter kewarganegaraan. Sedangkan kandungan kompetensi kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 31,75% komponen pengetahuan kewarganegaraan, 39,68% komponen keterampilan kewarganegaraan dan 28,57% komponen sikap/karakter kewarganegaraan.

2. Persamaan dan perbedaan muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk tingkat satuan pendidikan SMP.

Menurut hasil penelitian dan analisis terhadap Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2006 dan 2013 ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama, mata pelajaran PKn pada Kurikulum 2006 dan 2013 mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan secara utuh yang terdiri dari komponen pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Persamaan yang kedua, dicermati dari penggunaan KKO (kata kerja

operasional), komponen sikap/karakter kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 dan 2013 mempunyai jumlah persentase yang sama, yakni 28,89% dan 28,57%. Selain persamaan, terdapat perbedaan. Setelah dicermati dari penggunaan KKO (kata kerja operasional), Kurikulum 2006 didominasi oleh komponen pengetahuan kewarganegaraan dengan jumlah persentase 66,67%. Sedangkan Kurikulum 2013 didominasi oleh komponen keterampilan kewarganegaraan dengan jumlah persentase 39,68%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), peneliti memiliki saran bagi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

1. Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hendaknya selalu membekali diri dengan mengikuti secara bijak

perkembangan kurikulum, terutama yang menyangkut mata pelajaran PKN. Sebagai calon guru PKN, mahasiswa PKN harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan agar bisa mengembangkan model pembelajaran PKN saat nanti menjadi guru PKN.

2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Guru PKN hendaknya selalu memiliki kemampuan diri dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi kewarganegaraan di kelas walaupun tidak ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dengan selalu memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Branson, MS. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.

Burhan Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam*

Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Cholisin. 2011. "Peran Guru PKN dalam Upaya Membentuk Karakter Bangsa". Disampaikan pada kegiatan seminar Peran Guru PKN dalam Upaya Membentuk Karakter Bangsa yang berdasarkan Pancasila, diselenggarakan MGMP PKN Kabupaten Cilacap, di Gedung PGRI Jl. Kalimantan.

_____. 2015. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Hamid Darmadi. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Imam Gunawan. 2013. *Metode Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd
NIP. 19780630 200312 1 002

Reviewer



Suyato, M.Pd
NIP. 19670616 1994003 1 002